**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN TERHADAP
PERKEMBANGAN WILAYAH DAERAH OTONOMI BARU
(Studi Kasus DOB Buton Utara Pemekaran dari Kabupaten Muna)**

Mitra Sanjaya¹⁾, R. Marsuki Iswandi²⁾, La Ode Geo³⁾

¹⁾Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pascasarjana UHO

²⁾Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO

³⁾ Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO

Email: ppwjurnal@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the development of Economic Performance in North Buton Regency; knowing the progress of the North Buton Regency Public Service Performance; and knowing the Development of Regional Infrastructure as a basic service facility in North Buton Regency consisting of 6 (six) Subdistricts, that is Kulisusu, Bonegunu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Kambowa, and Wakorumba. This study uses an analysis of the development of regional economic performance, analysis of public service performance, and analysis of regional infrastructure development. The results showed that (1) the average development of GRDP on the basis of constant prices before expansion is 5,52 percent and after expansion of 8.23 percent and the average growth rate of Regional Original Income has grown by 16,03 percent; (2) The ratio of the availability of educational facilities for elementary and junior high school levels before expansion is 73.61 percent while after division is 78,32 percent and the availability of health facilities before pemekaran is 5,5 percent while after division is 12.5 percent; (3) growth in the number of education facilities before expansion by 3,7 percent and after division of 4.4 percent, the development of the number of health facilities before pemekaran was 6.1 percent and after expansion of 15,3 percent, the development of religious facilities before expansion was 2,7 percent and after expansion 3,5 percent, and road infrastructure the average growth before expansion is a paved road of 6 percent and not paved 8,54 percent, while after expansion the average paved road growth is 34.89 percent, while the average growth of non-asphalt roads is 17,83 percent.

Keywords: Economic Performance, Public Service, and Regional Infrastructure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan Kinerja Ekonomi wilayah Kabupaten Buton Utara; mengetahui perkembangan Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Buton Utara; serta mengetahui Perkembangan Infrastruktur Wilayah sebagai fasilitas pelayanan dasar di Kabupaten Buton utara yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kulisusu, Bonegunu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Kambowa, dan Wakorumba. Penelitian ini menggunakan analisis perkembangan kinerja ekonomi wilayah, analisis kinerja pelayanan publik, serta analisis perkembangan infrastruktur wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rata-rata perkembangan PDRB atas dasar harga konstan sebelum pemekaran sebesar 5,52 persen dan setelah pemekaran sebesar 8,23 persen dan laju rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami perkembangan sebesar 16,03 persen; (2) Rasio ketersediaan sarana pendidikan untuk jenjang SD dan SMP sebelum pemekaran sebesar 73,61 persen sedangkan sesudah pemekaran sebesar 78,32 persen serta ketersediaan sarana kesehatan sebelum pemekaran sebesar 5,5 persen sedangkan sesudah pemekaran sebesar 12,5 persen; (3) pertumbuhan jumlah Sarana pendidikan sebelum pemekaran sebesar 3,7 persen dan sesudah pemekaran sebesar 4,4 persen, perkembangan jumlah sarana kesehatan sebelum pemekaran sebesar 6,1 persen dan sesudah pemekaran sebesar 15,3 persen, perkembangan sarana peribadatan sebelum pemekaran sebesar 2,7 persen dan sesudah pemekaran sebesar 3,5 persen, serta infrastruktur jalan rata-rata pertumbuhan sebelum pemekaran yaitu jalan diaspal sebesar 6 persen dan tidak diaspal 8,54 persen, sedangkan setelah pemekaran rata-rata pertumbuhan jalan diaspal sebesar 34,89 persen, sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan jalan yang bukan aspal sebesar 17,83 persen.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.32/2004 tentang Otonomi Daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengusulkan diri untuk menjadidaerah otonom baru dengan tujuanmendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakanpembangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya. Pembentukan daerah otonomi baru atau yang biasa disebutpemekaran daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahmasing-masing. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sum2ber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemekaran wilayah merupakan pembentukan wilayah baru dari suatu wilayah administratif, sebagai suatu proses penyelenggaraan desentralisasi dan atau otonomi daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiriuntuk mengelolah potensi daerah, efisiensi ekonomi dalam aktivitas-aktivitas perencanaan,pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Pemekaran wilayah berupa pembentukan daerah otonom baru, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Bab II, pembentukan daerah dapat berupa daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, yang mana pada Ayat ke (2) pembentukan daerah kabupaten/kota merupakan pemekaran dari satu kabupaten/kota menjadi dua kabupaten/kota atau lebih. DOB dibentuk agar wilayah tersebut dapat mengembangkan diri berdasarkan potensi lokal yang dimiliki sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan aspek-aspek kesejahteraan lain dapat dicapai. Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek, serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan berbagai bidang kehidupan,

sehingga kesejahteraan di segala bidang pun diharapkan bisa diwujudkan. (Arianti, 2016).

Pemekaran wilayah merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Sehingga diharapkan, dengan adanya pemekaran wilayah masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, karena pelayanan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul wacana-wacana melakukan pemekaran wilayah, yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mampu meningkatkan kesejateraaan masyarakat. Pemekaran wilayah harus benar-benar dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memperpendek alur pelayanan sehingga akan tercipta pelayanan berkualitas yang ditunjukkan dengan kemajuan suatu daerah otonom (Roekminiati, 2014)

Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Otonomi daerah sebagai salah satu paradigma pembangunan sarat dengan permasalahan dalam setiap pelaksanaannya, Namun ditengah permasalahan yang timbul, otonomi dirasa memberikan pemikiran positif dalam konteks pengembangan wilayah. Terdapat beberapa dampak positif pemberlakuan otonomiyaitu 1). Otonomi memungkinkan terlaksananya*bottom up planning* secara signifikan; 2) Otonomi daerah mengikis rantai birokrasi yang dirasakan menghambat pelayanan kepada masyarakat.3). Otonomi juga akan dapat meberdayakan partisipasi masyarakat yang lebih besardalam pembangunan sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. (Sudantoko, 2003)

Menurut Emerson Marinhoa, Guaracyane Campelob, João Franc,aa, Jair Araujoca (2017), infrastruktur merupakan komponen atau modal penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, potensi infrastruktur berpengaruh terhadap ketenagakerjaan, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sektor ekonomi. Dan hal ini akan meningkatkan atau

mengembangkan kegiatan ekonomi dan mendorong mengurangi kemiskinan.

Pemekaran merupakan bagian dari penguatan ketahanan nasional, yang di implementasikan melalui pelaksanaan otonomi daerah sebagai amanat UU secara konstitusional maupun legal diarahkan sebagai akselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Pohan, 2015)

Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah, agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah yang lain. Dengan pemekaran diharapkan masyarakat merasakan peningkatan pelayanan, memudahkan untuk mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga kesejahteraan akan tercapai. Salah satu ukuran kesejahteraan adalah pendapatan per kapita. (Riani, 2012)

Hofman *et al* (2005) mengatakan pemekaran daerah itu dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada para konstituenya. Oleh karena di antarabupaten/kota terdapat perbedaan kebutuhan pelayanan publik dengan karakteristik yang berbeda, maka seyogyanya daerah kota dimekarkan dari kabupaten induknya agar masing-masing daerah dapat berspesialisasi dalam penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakatnya. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan regional memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sub-regional melalui hubungan ekonomi dan sosial: urbanisasi, industri pembangunan, pertumbuhan per kapita, jumlah yang lebih tinggi sarana lembaga pendidikan dan sebagainya. (Sangaran, 2013) .

Pengembangan infrastruktur diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang menunjukkan pola saling terkait. Pembangunan infrastruktur tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih mendorong peningkatan investasi. Karena itu, peningkatan infrastruktur pembangunan ke daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah diharapkan menjadi stimulus untuk peningkatan investasi di daerah itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. (Jumadi, 2013) Selanjutnya Demurger (2001) mengungkapkan bahwa sarana transportasi khususnya jalan dan prasarana telekomunikasi akan memacu pertumbuhan wilayah dan memecah gap yang memicuketimpangan wilayah.

Proses desentralisasi dan otonomi daerah memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah yaitu mempercepat perkembangan ekonomi kabupaten/ kota yang baru dibentuk (Muta'ali, 2011). Selanjutnya Simangunsong (2011), menyatakan sejatinya pemekaran daerah berdampak positif bagi tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Pemekaran wilayah sebagai salah satu bentuk pengembangan wilayah di satu sisi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sisi lain menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang juga akan diikuti oleh pembangunan wilayah. Kegiatan pembangunan tersebut berupa pembangunan pada infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang meningkatkan daya tarik daerah. Implikasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah, pada satu sisi produk yang ada dari pusat pertumbuhan akan digunakan pada kegiatan ekonomi yang ada pada daerah sekitarnya, sedangkan sisi lainnya hasil dari kegiatan ekonomi yang ada di daerah sekitar tersebut akan mempunyai peluang untuk digunakan pada pusat pertumbuhan. Kondisi ini akan menciptakan hubungan timbal balik yang akan menjadi generator bagi pertumbuhan perekonomian daerah (Sagala, 2009). Sebagai salah satu bentuk pengembangan wilayah, pemekaran wilayah diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antar wilayah (*regional disparity*), serta dapat menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah (Muta'ali, 2011).

Peran yang ditentukan dari tingkat pemerintahan yang terdesentralisasi dalam fungsi alokasi anggaran yang sangat besar karena banyak layanan publik tidak mungkin seragam di suatu daerah. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan akan ditingkatkan dengan proses desentralisasi karena masyarakat dapat memiliki layanan publik dan Anggaran sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah tersebut. (Philip, 2012).

Pembangunan ekonomi yang merata dalam hal ini peningkatan PDRB dan juga peningkatan indeks pembangunan Manusia. Sedangkan data peningkatan PDRB Buton Utara

JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO atas dasar harga konstan 2010 Tahun 2010-2016 adalah relatif rendah dimana pada Tahun 2010 nilai PDRB sebesar 1.194.945,13 juta rupiah dan mengalami peningkatan yang kurang signifikan pada tahun-tahun berikutnya yaitu pada Tahun 2011 nilai PDRB sebesar 1.308.885.40, kemudian pada tahun 2012 sebesar 1.423.852,51, Tahun 2013 sebesar 1.549.525.44, Tahun 2014 sebesar 1.698.126,75, Tahun 2015 sebesar 1.768.238,60 sedangkan pada Tahun 2016 adalah sebesar 1.875.125,19. (BPS. Buton Utara, 2017)

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan Kinerja Ekonomi wilayah Kabupaten Buton Utara.
2. Mengetahui perkembangan Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Buton Utara
3. Mengetahui Perkembangan Infrastruktur Wilayah sebagai fasilitas pelayanan dasar di Kabupaten Buton utara.

METODE PENELITIAN

a. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Kecamatan Kambowa, dan Kecamatan Wakorumba. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April 2018 sampai dengan Bulan Juni 2018.

b. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari instansi dan dinas-dinas terkait dengan penelitian. BPS, Bappeda, SKPD Kabupaten Buton Utara dan hasil penelitian terdahulu. Data penelitian meliputi data sebelum pemekaran (1998-2007), sedangkan data setelah pemekaran digunakan data mulai tahun 2008-2017. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur

kesehatan, infrastruktur ekonomi dan data sekunder lainnya yang digunakan sebagai gambaran bagaimana perkembangan Kabupaten Buton Utara setelah pemekaran wilayah.

c. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik (fasilitas pendidikan dan kesehatan) sebelum dan setelah pemekaran, dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio perbandingan yaitu :

- a. Rasio fasilitas pendidikan untuk 10.000 penduduk :

$$\frac{JFPT}{JP} \times 10.000$$

r =

Keterangan :

JFPT = Jumlah fasilitas pendidikan tertentu

JP = Jumlah penduduk

R = Rasio fasilitas pendidikan untuk 10.000 penduduk

- b. Rasio fasilitas kesehatan untuk 10.000 penduduk :

$$\frac{JFK}{JP} \times 10.000$$

r =

Keterangan :

JFK = Jumlah fasilitas kesehatan

JP = Jumlah penduduk

R = Rasio fasilitas kesehatan untuk 10.000 penduduk

(BAPPENAS, 2007).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didekati dengan menghitung pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

$$G = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

$PDRB_t$ = PDRB atas dasar harga konstan pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB atas dasar harga konstan pada tahun t-1 (tahun sebelumnya)

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB perkapita dihitung dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang digunakan untuk membagi adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Berdasarkan PDRB perkapita dapat diketahui besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah.

$$\text{PDRB Perkapita}_t = \frac{\text{PDRB}_t}{\text{Jumlah Penduduk}_t}$$

4. Pertumbuhan Infrastruktur Wilayah

$$G = \frac{\text{JIT}_t - \text{JIT}_{t-1}}{\text{JIT}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

JIT_t = Jumlah Infrastrukutr Tertentu pada tahun t

PDRB_{t-1} = Jumlah Infrastrukutr Tertentu pada tahun t-1 (tahun sebelumnya)

5. Rata-Rata Pertumbuhan Infrastruktur Wilayah

Untuk Rumus yang digunakan untuk melihat rata-rata pertumbuhan infrastruktur wilayah adalah sebagai berikut:

$$r = \{(\text{Pt} / \text{Po})^{(1/n)} - 1\} \times 100$$

dimana:

- r = Rata-rata pertumbuhan
- Pt = Jumlah data pada tahun terakhir
- Po = jumlah data pada tahun awal
- n = selisih tahun Pt dengan P

dimana:

- r = Rata-rata pertumbuhan
- Pt = Jumlah data pada tahun terakhir
- Po = jumlah data pada tahun awal
- n = selisih tahun Pt dengan P

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan Kinerja Ekonomi Wilayah

Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, selaras dan diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna di seluruh tingkat administrasi pemerintahan. Salah satu refleksi dari pembangunandaerah tersebut adalah pembangunan ekonomi daerah yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota (Elly, 2013).

Perkembangan PDRB kabupaten Buton Utara Atas dasar harga berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 1998 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Buton Utara sebelum pemekaran sebesar 5,52 persen dan setelah pemekaran sebesar 8,23 persen, hal menunjukkan bahwa adanya peningkatan di sektor perekonomian sebesar 2,71 persen. Peningkatan yang signifikan terjadi pada sektor Bangunan/konstruksi yaitu mengalami peningkatan sebesar 4,44 persen, sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Buton Utara yang mengalami peningkatan yang terkecil adalah sektor Perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 1,24 persen.

Tabel 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Buton Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan usaha.

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)		Tingkat perkembangan (%)
		Sebelum pemekaran (1998-2007)	Setelah pemekaran (2008-2017)	
1	Pertanian	3,96	5,93	1,97
2	Pertambangan dan penggalian	8,80	12,16	3,36
3	Industri pengolahan	7,77	9,37	1,60
4	Listrik, Gas dan Air bersih	5,49	8,63	3,14
5	Bangunan	6,83	11,27	4,44
6	Perdagangan, hotel dan restoran	8,40	9,64	1,24
7	Pengangkutan dan komunikasi	8,43	11,71	3,28
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	6,32	9,54	3,22
9	Jasa-jasa	4,29	8,32	4,03
PDRB		5,52	8,23	2,71

Apabila dilihat dari Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) struktur perekonomian Kabupaten Buton Utara juga mengalami peningkatan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (BDRB)

Kabupaten Buton Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 1998-2007 sebelum pemekaran dan tahun 2008-2017 sesudah pemekaran dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan PDRB Kabupaten Buton Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha tahun 1998-2007 sebelum pemekaran dan tahun 2008-2017 sesudah pemekaran

No	Lapangan usaha	Pertumbuhan (%)		Tingkat perkembangan (%)
		Sebelum pemekaran (1998-2007)	Setelah pemekaran 2008-2017	
1	Pertanian	7,34	9,40	2,06
2	Pertambangan dan penggalian	5,47	16,80	11,33
3	Industri pengolahan	7,38	14,55	7,17
4	Listrik, Gas dan Air bersih	6,51	11,63	5,12
5	Bangunan	5,67	15,05	9,38
6	Perdagangan, hotel dan restoran	6,85	12,72	5,87
7	Pengangkutan dan komunikasi	8,29	13,40	5,11
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	9,51	11,14	1,63
9	Jasa-jasa	5,69	10,97	5,28
PDRB		6,7	11,60	4,9

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita sebelum pemekaran berdasarkan harga konstan adalah sebesar 3,3 dan setelah pemekaran rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan setelah pemekaran adalah sebesar 5,4 dalam hal ini mengalami peningkatan setelah pemekaran yaitu sebesar 2,1. Sedangkan

rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku sebelum pemekaran yaitu sebesar 4,6 kemudian setelah pemekaran rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 8,69. Dalam hal ini mengalami peningkatan yang signifikan untuk PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku setelah pemekaran yaitu sebesar 4,09.

Tabel 3. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Buton Utara 1998-2007 sebelum pemekaran dan tahun 2010-2016 sesudah pemekaran.

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		Sebelum pemekaran (1998-2007)	Setelah pemekaran (2008-2017)	Tingkat perkembangan (%)
1	PDRB Perkapita ADHK	3,3	5,4	2,1
2	PDRB perkapita ADHB	4,6	8,69	4,09

Menurut Murniati (2017) Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada waktu tertentu, yang biasanya satu tahun. Nilai diperoleh dari membagi nilai Produk Nasional Bruto atau Produk Domestik Bruto tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu.

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan pertumbuhan PAD Kabupaten Buton Utara sebelum mengalami pemekaran, tingkat pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada

Tahun 2002 yaitu sebesar 33,05 persen dengan nilai PAD sebesar 687.768,547, kemudian pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 31,97 persen dengan besaran PAD senilai 907,692,307, kemudian pada Tahun 2005 besaran PAD senilai 1,030,769,230 dan pada Tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 11,94 persen dengan besaran PAD senilai 1,153,846,153, untuk pertumbuhan rata-rata PAD Kabupaten Buton Utara sebelum pemekaran yaitu 18,20 persen.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 1998 - 2007 (sebelum pemekaran)

No.	Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
1	1998	350.076.654	-
2	1999	395.076.378	8
3	2000	423.076.918	10
4	2001	516.923.076	22,2
5	2002	687.768.547	33,05
6	2003	907.692.307	31,97
7	2004	1.130.769.230	24,57
8	2005	1.030.769.230	-8,84
9	2006	1.153.846.153	11,94
10	2007	1.345.643.879	9,7
Pertumbuhan Rata-rata			18,20

Sumber : BPS Muna (Data diolah), 2018

Berdasarkan Tabel 5. yang merupakan gambaran pertumbuhan PAD Kabupaten Buton Utara sesudah pemekaran, pada Tahun 2010 untuk nilai PAD yaitu senilai 5.580.063.443 mengalami pertumbuhan pada Tahun 2011 sebesar 9,8 persen dengan nilai PAD sebesar 6.130.063.443 kemudian pada Tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 72,9 persen dengan nilai PAD 10.600.881.731 selanjutnya pada Tahun 2013 nilai PAD yaitu 9.826.179.237 mengalami penurunan sebesar -7,3 persen, kemudian pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -5,2 persen dengan nilai PAD yaitu

9.307.044.123 selanjutnya pada tahun 2015 meningkat sebesar 63 persen dengan nilai PAD sebesar 15.256.538.521 untuk pertumbuhan rata-rata PAD Kabupaten Buton Utara setelah pemekaran adalah 17,41 persen.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 - 2017 (sesudah pemekaran)

No.	Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
1	2008	3.987.895.345	-
2	2009	4.674.876.998	7,7
3	2010	5.580.063.443	6
4	2011	6.130.063.443	9,8

5	2012	10.600.881.731	72,9
6	2013	9.826.179.237	-7,3
7	2014	9.307.044.123	-5,2
8	2015	15.256.538.521	63
9	2016	10.873.843.321	-28,7
10	2017	12.457.857.345	15
rata-rata			17,41

Sumber : BPS Buton Utara, (Data Diolah)

Analisis Kinerja Pelayanan Publik

a Fasilitas pendidikan Sebelum dan Setelah Pemekaran

Fasilitas pendidikan termasuk dalam salah satu fasilitas sosial yang merupakan kebutuhan bagi penduduk suatu wilayah untuk memfasilitasi aktivitas kehidupan sehari-hari. Fasilitas pendidikan yang menjadi prioritas penunjang dalam melengkapi pemenuhan ketersediaan infrastruktur sosial di suatu pemukiman (Henlita, 2013).

Rasio ketersediaan sarana pendidikan untuk jenjang SD dan SMP kabupaten Buton Utara periode sesudah pemekaran, dimana rata-rata rasio ketersediaan sarana pendidikan untuk

jenjang sekolah Dasar yaitu sebesar 78,32 artinya bahwa dalam setiap 10.000 siswa ditampung 78 sarana pendidikan. Kemudian untuk jenjang SMP untuk rata-rata rasio ketersediaan sekolah adalah

Tabel 6. Rasio ketersediaan Sarana Pendidikan untuk jenjang SD dan SMP Kab. Buton Utara sesudah pemekaran (2008-2017)

Tahun	Jenjang Pendidikan					
	SD			SMP		
	Sekolah	Siswa	Rasio	Sekolah	Siswa	Rasio
2008	70	8.987	70,7	25	3.356	66
2009	70	9.087	71,6	25	3.567	64
2010	71	9.992	71,05	26	3.835	67,79
2011	75	9.678	77,49	38	4.044	93,96
2012	75	9.678	77,49	38	4.044	93,96
2013	74	9.628	76,85	40	4.079	98,08
2014	74	9.398	78,74	34	3.898	87,22
2015	75	8.974	83,57	35	4.037	86,69
2016	75	9.028	83,07	35	4.125	84,84
2017	75	9.143	84,5	35	4.214	83,76
Rata-rata			78,32			87,50

b Fasilitas Kesehatan Sebelum dan Setelah Pemekaran

sebesar 87,50 artinya dalam setiap 10.000 siswa ditampung sekitar 87 sekolah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa setelah pemekaran wilayah adanya peningkatan yang signifikan yang ditunjukkan dengan nilai rasio ketersediaan sarana pendidikan. Bertambahnya jumlah pelajar SMP pada setiap kecamatan mencerminkan meningkatnya tingkat pendidikan di Kabupaten Buton Utara. Adapun tingkat perkembangan kualitas sumber daya manusia pada tingkat SMP dapat dilihat pada Tabel 6.

Untuk melihat ketersediaan fasilitas kesehatan dapat Ketersediaan fasilitas

kesehatan Ketersediaan tenaga kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10 ribu penduduk.

Tabel 7. Rasio ketersediaan fasilitas kesehatan Kab. Buton Utara sebelum pemekaran (1998-2007)

No	Tahun	Fasilitas kesehatan (unit)	Jumlah penduduk (jiwa)	Rasio
1	1998	20	40.775	4,8
2	1999	20	41.436	4,9
3	2000	21	42.866	4,8
4	2001	22	44.330	4,9
5	2002	25	45.113	5,5
6	2003	26	46.196	5,6
7	2004	28	46.885	5,9
8	2005	29	47.770	6
9	2006	30	48.334	6,2
10	2007	31	49.223	5,4
Rata-rata				5,5

Tabel 7. tersebut menunjukan ketersediaan sarana Kesehatan kabupaten Buton Utara sebelum pemekaran wilayah, dimana rata-rata rasio ketersediaan sarana kesehatan yaitu 5,5 yang artinya bahwa setiap 10.000 penduduk terdapat sekitar 5 fasilitas kesehatan.

Tabel 9. Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Buton Utara sesudah pemekaran (2008-2017)

No	Tahun	Fasilitas kesehatan (unit)	Jumlah penduduk (jiwa)	Rasio
1	2008	40	48.834	8,03
2	2009	42	55.527	9,3
3	2010	44	54.736	8,03
4	2011	52	55.527	9,3
5	2012	66	56.631	11,6
6	2013	65	57.422	11,3
7	2014	51	58.918	8,6
8	2015	119	59.779	19,19
9	2016	120	61.124	19,6
10	2017	121	62.326	19,41
Rata-rata				12,5

Tabel 9 diatas menunjukan ketersediaan sarana Kesehatan kabupaten Buton Utara sesudah pemekaran wilayah, dimana rata-rata rasio ketersediaan sarana kesehatan yaitu 12,5 yang artinya bahwa setiap 10.000 penduduk terdapat sekitar 12 fasilitas kesehatan.

Tabel 10. Rasio ketersediaan Tenaga kesehatan Kab. Buton Utara sesudah pemekaran (2008-2017)

Tabel 8. Rasio ketersediaan Tenaga kesehatan Kab. Buton Utara sebelum pemekaran (1998-2007)

No	Tahun	Tenaga kesehatan (jiwa)	Jumlah penduduk (jiwa)	Rasio
1	1998	60	40.866	16,80
2	1999	65	41.330	19,17
3	2000	72	42.866	16,80
4	2001	85	44.330	19,17
5	2002	102	45.113	22,61
6	2003	122	46.196	26,41
7	2004	138	46.885	29,43
8	2005	164	47.770	34,33
9	2006	185	48.334	38,28
10	2007	190	49.124	25,65
Rata-rata				16,80

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 8. menunjukkan rasio ketersediaan tenaga kesehatan Kabupaten Buton Utara sebelum pemekaran, dimana untuk rasio rata-rata ketersediaan tenaga kesehatan yaitu sebesar 16,83 artinya bahwa setiap 10.000 penduduk terdapat 16 tenaga kesehatan.

No	Tahun	Tenaga kesehatan (jiwa)	Jumlah penduduk (jiwa)	Rasio
1	2008	225	52.736	42,66
2	2009	230	53.527	42,96
3	2010	237	54.736	43,30
4	2011	241	55.527	43,40
5	2012	254	56.631	44,85
6	2013	257	57.422	44,76
7	2014	274	58.918	46,51
8	2015	293	59.799	49,00
9	2016	300	61.124	49,08
10	2017	563	62.088	90,00
Rata-rata				45,84

Sumber : BPS Buton Utara, 2017

Tabel 10. menunjukkan rasio ketersediaan tenaga kesehatan Kabupaten Buton Utara sesudah pemekaran, dimana untuk rasio rata-rata ketersediaan tenaga kesehatan yaitu sebesar 45.84 artinya bahwa setiap 10.000 penduduk terdapat sekitar 45 tenaga kesehatan.

Analisis Perkembangan Infrastruktur Wilayah

a. Sarana Pendidikan

Fasilitas pendidikan termasuk dalam salah satu fasilitas sosial yang merupakan kebutuhan bagi penduduk suatu wilayah untuk memfasilitasi

aktivitas kehidupan sehari-hari. Fasilitas pendidikan yang menjadi prioritas penunjang dalam melengkapi pemenuhan ketersediaan infrastruktur sosial di suatu pemukiman (Henlita, 2013).

Tabel 11. Pertumbuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun sebelum pemekaran

No	Tahun	Sarana Pendidikan (unit)	Pertumbuhan (%)
1.	1998	80	-
2.	1999	84	3,4
3.	2000	88	3,6
4.	2001	91	3,4
5.	2002	96	5,4
6.	2003	100	4,1
7.	2004	103	3
8.	2005	105	1,9
9.	2006	110	4,7
10	2007	127	4,7
Rata-rata			3,7

Sumber :

Berdasarkan tabel 11. tersebut bahwa pertumbuhan jumlah sekolah Di Kabupaten Buton Utara sebelum pemekaran sangat lamban, dimana setiap tahunnya rata-rata pertumbuhannya hanya berkisar 3,7 persen.

Tabel 12.. Pertumbuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 - 2017 (setelah pemekaran)

No	Tahun	Sarana Pendidikan (unit)	Pertumbuhan (%)
1.	2008	134	-
2.	2009	148	10,44
1.	2010	161	8,7
2.	2011	178	10,5
3	2012	183	2,8
4	2013	186	1,6
5	2014	197	5,9
6	2015	203	3
7	2016	209	2,9
10	2017	218	4,3
Rata2			4,4

Tabel 12. tersebut menunjukan pertumbuhan sarana Pendidikan Kabupaten Buton Utara Setelah Pemekaran mempunyai rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya adalah sebesar 4,4 %.

b. Sarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya yang menjangkau sebagian besar masyarakat sampai ke daerah-daerah, sehingga diharapkan sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pedesaan mendapatkan

pelayanan kesehatan yang mudah dicapai dan bermutu. Pembangunan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil bila kebutuhan akan sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Sagita (2013)

Tabel 13. Pertumbuhan Sarana kesehatan di Kabupaten Buton Utara Tahun sebelum pemekaran

No	Tahun	Sarana kesehatan (unit)	Pertumbuhan (%)
1.	1998	18	-
2.	1999	20	4,4
3.	2000	21	4,5
4.	2001	22	4,7
5.	2002	25	13,6
6.	2003	26	4
7.	2004	28	7,6
8.	2005	29	3,5
9.	2006	30	3,4
10.	2007	30	3,4
Rata-rata			6,1

Sumber : Muna Dalam Angka, 2005

Berdasarkan Tabel 13, menunjukkan perkembangan jumlah sarana kesehatan Kabupaten Buton Utara sebelum pemekaran pada Tahun 2000 jumlah sarana kesehatan hanya berjumlah 21 unit meningkat pada tahun 2001 sebesar 4,7 persen atau berjumlah 22 unit, kemudian pada tahun 2002 meningkat sebesar 13,6 persen atau bertambah sebanyak 25 persen. Untuk rata-rata pertumbuhan setiap tahun untuk sarana kesehatan adalah sebesar 6,1 persen

Tabel 14. Pertumbuhan Sarana kesehatan di Kabupaten Buton Utara Tahun setelah pemekaran

No	Tahun	Sarana kesehatan (unit)	Pertumbuhan (%)
1.	2008	30	-
2.	2009	38	9
3.	2010	44	17
4.	2011	52	18
5	2012	66	26,9
6	2013	67	1,5
7	2014	71	5,9
8	2015	89	25
9	2016	102	14,6
10	2017	120	17,64
Rata2			15,3

Sumber : Buton Utara Dalam Angka, 2018

Tabel 14. menunjukkan bahwa tahun 2010 jumlah sarana kesehatan sebanyak 44 unit dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 18 persen menjadi 52 unit. Untuk rata-rata pertumbuhan jumlah sarana kesehatan tiap tahunnya adalah sebesar 15,3 persen

c. Sarana perdagangan

Sarana perdagangan sangat penting dalam hal perekonomian suatu daerah, semakin banyak sarana perdagangan mengindikasikan pertumbuhan yang baik pada suatu daerah tertentu.

Tabel 15. Pertumbuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Buton utara sebelum pemekaran

No	Tahun	Sarana Perdagangan (unit)	Pertumbuhan (%)
1	1998	35	-
2	1999	40	14
3.	2000	48	20
4.	2001	50	4,17
5.	2002	58	16,00
6.	2003	64	10,34
7.	2004	80	25,00
8.	2005	97	21,25
9.	2006	106	9,28
10.	2007	115	6,6
Rata2			14,12

Sumber : Muna Dalam Angka, (Data Diolah)

Tabel 15 menunjukkan pertumbuhan sarana Perdagangan di Kabupaten Buton utara periode sebelum pemekaran, dimana Untuk rata-rata pertumbuhan unit sarana perdagangan adalah sebesar 14,12 persen.

Tabel 16. Pertumbuhan Sarana Perdagangan Kabupaten Buton utara sesudah pemekaran

No	Tahun	Sarana Perdagangan (unit)	Pertumbuhan (%)
1.	2008	117	-
2.	2009	137	17
3.	2010	152	10
4.	2011	165	8,55
5.	2012	224	35,76
6.	2013	316	41,07
7.	2014	342	8,23
8.	2015	458	33,92
9.	2016	878	91,70
10	2017	923	
Rata2			33,95

Sumber : Buton Utara Dalam Angka, (Data Diolah)

Tabel 16. menunjukkan pertumbuhan sarana Perdagangan di Kabupaten Buton utara periode sesudah pemekaran, dimana Untuk rata-rata pertumbuhan unit sarana perdagangan setelah pemekaran wilayah adalah sebesar 33,95 persen.

Sarana Ibadah

Pembangunan di bidang Agama diarahkan untuk menciptakan keselarasan hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya serta dengan alam sekitarnya. Indikator pembangunan bidang agama, digambarkan dengan pembangunan sarana peribadatan di Kabupaten Buton Utara

Tabel 17. Pertumbuhan Sarana Peribadatan di Kabupaten Buton utara tahun sebelum pemekaran

No	Tahun	Sarana Peribadatan (unit)	Pertumbuhan (%)
1	1998	57	-
2	1999	60	3,1
3.	2000	62	3
4.	2001	64	3,2
5	2002	66	3,1
6	2003	67	1,5
7	2004	70	4,4
8	2005	71	1,4
9	2006	73	2,8
10.	2007	74	1,4
Rata2			2,76

Sumber : Muna Dalam Angka, 2005 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 17. menunjukkan sarana peribadatan Kabupaten Buton Utara sebelum pemekaran wilayah pertumbuhan rata-rata jumlah sarana peribadatan untuk periode 1998-2007 tiap tahun adalah sebesar 2,76 persen

Tabel 18. Pertumbuhan Sarana Peribadatan di Kabupaten Buton utara (sesudah pemekaran)

No	Tahun	Sarana Peribadatan (unit)	Pertumbuhan (%)
1.	2008	95	-
2.	2009	97	2
3.	2010	95	2
4.	2011	97	2
5	2012	98	1,03
6	2013	99	1,02
7	2014	102	3,03
8	2015	108	5,8
9	2016	117	8,3
10	2017	118	1,02

Rata2	3,53

Sumber : Buton Utara Dalam Angka, 2018

Tabel 18. menunjukkan pertumbuhan sarana Peribadatan di Kabupaten Buton utara periode sesudah pemekaran bahwa tahun 2010 jumlah sarana ibadah sebanyak 95 unit dan meningkat sebesar 2 persen pada tahun 2011 yaitu sebanyak 97 unit. Untuk rata-rata pertumbuhan unit sarana peribadatan adalah sebesar 3,53 persen.

Sarana Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, maupun antara kota dengan desa dan antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya.

Tabel 19. Data Panjang Jalan di kabupaten Buton utara Tahun 1998-2007 (Sebelum Pemekaran)

No	Tahun	Jenis permukaan			Pertumbuha n (%)	Jumlah
		Aspal (Km)	Pertumbuhan (%)	Bukan Aspal (Km)		
1	1998	17,37	-	17,02	-	34,38
2	1999	18,18	4,66	18,51	8,75	32,69
3	2000	17,37	5	17,02	7	34,38
4	2001	18,18	4,66	18,51	8,75	32,69
5	2002	18,98	4,40	19,78	6,86	33,76
6	2003	20,18	6,32	22,82	15,37	33
7	2004	23	13,97	23,31	2,15	41,30
8	2005	23,57	2,48	25,35	8,75	41,92
9	2006	24,63	4,50	27,83	9,78	43,46
10	2007	25,78	4,9	29,40	7,89	45,98
Rata-rata			6		8,54	

Tabel 19. menunjukkan Perkembangan peningkatan jalan kabupaten Buton utara untuk periode 1998-2007 (sebelum pemekaran) rata-rata pertumbuhan jalan Aspal adalah sebesar 6 % ,sedangkan

rata-rata pertumbuhan jalan yang bukan aspal adalah sebesar 8,54% . Sedangkan untuk mengetahui peningkatan panjang jalan Kabupaten Buton Utara setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 20. Peningkatan jalan pertahun di kabupaten Buton utara Tahun 2008-2017 (Sesudah Pemekaran)

No	Tahun	Jenis permukaan aspal			Pertumbuha n (%)	Jumlah
		Aspal (Km)	Pertumbuha n (%)	Bukan Aspal (Km)		
1	2008	25	-	143,8	-	168,8
2	2009	29	5,7	154,9	15	183,9
3	2010	32	6,7	164,42	18	196,42
4	2011	77,1	140,94	273,4	66,28	350,1

5	2012	81,1	5,19	368,4	34,75	449,5
6	2013	87,38	7,74	354,92	-3,66	442,3
7	2014	118,95	36,13	478,02	34,68	596,97
8	2015	133,22	12,00	486,90	1,86	620,12
9	2016	192,77	44,70	440,06	-9,62	632,83
10	2017	198,88	8	460,08	8	650,76
Rata-rata			34,89			17,83

Sumber: Dinas PU Buton Utara, 2018

Tabel 12 menunjukkan tingkat pertumbuhan jalan Kab. Buton Utara setelah pemekaran, dimana rata-rata pertumbuhan jalan aspal adalah sebesar 34,89%. Sedangkan untuk

pertumbuhan rata-rata jalan yang bukan aspal adalah sebesar 17,83%.

Adapun tingkat perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Buton Utara sebelum dan setelah pemekaran wilayah dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Perkembangan Jalan Diaspal di Kabupaten Buton Utara Tahun 1998-2007(sebelum pemekaran) dan Tahun 2008- 2017 (setelah pemekaran)

No	Jenis Permukaan Jalan	Rata-rata Pertumbuhan (%)		Tingkat perkembangan (%)
		Sebelum pemekaran 1998-2007	Setelah pemekaran 2008-2017	
1	Diaspal	6	34,89	28,89
2	Tidak Diaspal	8,54	17,83	9,29

Sumber: Hasil Analisis, 2018.

Tabel 13 menunjukkan bahwa tingkat perkembangan jalan diaspal yang ada di Kabupaten Buton Utara mengalami peningkatan setelah pemekaran wilayah adalah sebesar 28,89 persen. Kemudian untuk jalan bukan aspal mengalami perkembangan 9,29 % setelah pemekaran wilayah.

sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD setelah pemekaran adalah sebesar 35,17 persen atau mengalami perkembangan sebesar 16,03 persen.

- Hasil analisis Kinerja pelayanan publik kabupaten Buton Rasio ketersediaan sarana pendidikan sebelum pemekaran untuk jenjang Sekolah Dasar yaitu sebesar 73,61 ,SMP adalah sebesar 39,31. Rasio ketersediaan sarana pendidikan sesudah pemekaran untuk jenjang sekolah Dasar yaitu sebesar 78,32 ,SMP adalah sebesar 87,50. Ketersediaan sarana kesehatan yaitu sebelum pemekaran adalah 5,5 Sedangkan Ketersediaan sarana kesehatan sesudah pemekaran yaitu 12,5.
- Perkembangan infrastruktur wilayah sebelum dan setelah pemekaran terdapat perbedaan yang signifikan antara infrastruktur wilayah sebelum dan setelah pemekaran.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Rata-rata Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Buton Utara sebelum pemekaran sebesar 5,52 persen dan setelah pemekaran sebesar 8,23 persen. mengalami peningkatan sebesar 2,71% setelah pemekaran wilayah.
- Rata-rata Pertumbuhan PAD sebelum pemekaran adalah sebesar 19,14 persen

Saran

- Memprioritaskan alokasi anggaran pada program pengembangan wilayah

yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan jalan, sentra produksi, jalan tani, pada beberapa kecamatan yang memiliki potensi dan belum dikembangkan secara optimal.

- 2) Mengembangkan teknologi tepat guna serta inovasi guna meningkatkan nilai ekonomi bagi produk komoditas unggulan di Kabupaten Buton Utara
- 3) Mengembangkan sarana pendidikan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Buton Utara, dimana masih perlu penambahan lokal sekolah .

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, N.N., dan Indra C.,2016. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan Ekonomi antar Daerah Pesisir diProvinsi Bengkulu*.Jurnal Agriseip, volume 16, edisi maret 2016 : 27 - 36
- BAPPENAS., 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Bappenas Bekerjasama dengan UNDP. *Building and Reinventing Decentralised Governance (BRIDGE)*.
- Demurger, S. (2001). Infrastructure development and economic growth: an explanaton for regional disparities in China? *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 95-117.
- Elly L. 2013. Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Sebelumnya Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 11 No. 02 Desember 2013.
- Emerson Marinho, Guaracyane Campelo, João Franc, Jair Araujoca, 2017. Impact of infrastructure expenses in strategic sectors forBrazilian poverty. *Economi A* 18 (2017) 244–259.
- Henlita S. Dan Marta K. D. 2013. Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik Pomist*. Vol. 2, No. 2
- Hofman, B., Fitriania; F., and K. Kaisera. *Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1): pp. 57-79.
- Juanda, B., 2007. *Pemekaran Daerah Serta Implikasinya terhadap APBN*. *Jurnal Ekonomi*, Volume XXV, Edisi Oktober 2007: 157-171.
- Jumadi , M. Pudjiharjo , G. Maski, M. Khusaini. 2013. *The Impact of Fiscal Decentralization on Local EconomicDevelopment in East Java*.IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). Volume 13, Issue 1 (Jul. - Aug. 2013), PP 01-07
- Murniati. 2017. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah TerhadapPendapatan Perkapita Dikabupaten Kerinci. *J-MAS* Vol.2 No.1
- Muta'ali, L., 2011. *Kapita Selektta Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Pohan, Z. S., 2015. Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008-2014 Terhadap Perkembangan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara Sesuai Dengan Pp No.129 Tahun 2000. *POLITIKA*, Vol. 6, No.2
- Philip, A. T., and S. Isah., 2012 *An Analysis of the Effect of Fiscal Decentralisation on Economic Growth in Nigeria*. *International Journal of Humanities and Social Science* ,Vol. 2 No. 8
- Roekminiati, S.2014. Evaluasi Dampak PemekaranKecamatan Terhadap IndeksPembangunan Manusia(Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume XI Nomor 2
- Riani, I. A. P., dan M. Pudjiharto. 2012. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan Dan

- Ketimpangan Antar wilayah Di Provinsi Papua. *Jurnal Bumi Lestari*. Volume 12, hlm. 137 - 148.
- Sagala, S. P., 2009. *Analisis Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung*. *Jurnal Ekonomi*
- Sagita R. 2013. Analisis Kausalitas Infrastruktur dengan Investasi Asing Untuk Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. *Economic Development Analysis Journal*, Vol 2 (4).
- Sang-Arun,. N.,2013.*Development of regional growth centres and impact on regional growth: A case study of Thailand's Northeastern region*. *Urbani izziv*. Vol. 24. No.1
- Simangunsong, T., 2011. *Solusi Bersama Pemekaran Daerah*.
- Sudantoko. D., 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.